

PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA SELANDIA BARU

Sherly Anggraeni¹, Djoko Siswanto M.²

^{1,2}Universitas Hang Tuah Surabaya

sherly.fisip20@hangtuah.ac.id¹, djoko.siswanto@hangtuah.ac.id²

Correspondence Author: djoko.siswanto@hangtuah.ac.id

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

4 September 2023

Reviewed

17 September 2023

Accepted

20 September 2023

Published

30 Maret 2024

Di dalam studi Perbandingan Administrasi Negara terkandung aspek yang relevan, yakni aspek Administrasi Negara yang mengandung pengertian umum tentang bagaimana, lembaga-lembaga negara tumbuh dan hidup didalam suatu negara menjalankan fungsinya. Administrasi Negara merupakan konsep yang memiliki berbagai macam definisi. Merujuk kesepakatan komite ahli administrasi negara di organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam rangka menyamakan persepsi bersama tentang administrasi negara, terdapat setidaknya empat definisi yang berbeda tentang administrasi negara (Committee of Experts on Public Administration, 2006). Pertama, administrasi negara sebagai pengorganisasian kebijakan dan program pemerintah juga perilaku pegawai (yang

bukan dipilih secara politis) yang secara formal memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Kedua, administrasi negara adalah semua proses, organisasi, dan individu (yang bertindak menduduki jabatan dan memiliki peran) terkait pelaksanaan hukum dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dari definisi tersebut diatas, dapat ditarik garis besar, bahwa administrasi negara bukanlah lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, melainkan, keseluruhan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh lembaga-lembaga negara tersebut dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Lebih tepatnya, administrasi negara merupakan keseluruhan instrumen lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan dasar hukum dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik, melalui berbagai dimensinya yang meliputi bidang manajemen, anggaran, sumber daya manusia, struktur dan prosedur.

Kata kunci: pemerintah, perbandingan, administrasi negara

ABSTRACT

The Comparative Study of State Administration contains relevant aspects, namely aspects of State Administration which contain a general understanding of how state institutions grow and live within a country to carry out their functions. State Administration is a concept that has various definitions. Referring to the agreement of the expert committee on state administration in the United Nations organization in order to equate a common perception on state administration, there are at least four different definitions of state administration (Committee of Experts on Public Administration, 2006). First, state administration as the organizer of government policies and programs as well as the behavior of employees (who are not politically elected) who formally have responsibility in carrying out the task of implementing these policies and programs. Second, state administration is all processes, organizations and individuals (who act in positions and have roles) related to the implementation of laws and other regulations issued by the legislature, executive and judiciary. From the definition above, an outline can be drawn, that state administration is not an executive, legislative, or judicial state institution, but rather, the overall implementation of what is decided by these state institutions in the context of administering public services. More precisely, state administration is the entire instrument of government institutions formed on the basis of law in the context of implementing public services, through its various dimensions covering the fields of management, budget, human resources, structure and procedures.

Keywords: government, comparison, state administration

PENDAHULUAN

Dalam mengatur pemerintahan sebuah negara harus memiliki cara yang sesuai demi berjalannya negara tersebut. Cara itulah yang sering disebut sebagai sistem pemerintahan. Sehingga sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Walaupun sistem pemerintahan diartikan hampir sama di setiap negara, namun ada kalanya sistem pemerintahan yang diterapkan setiap negara berbeda satu sama lain. Dengan memahami sistem pemerintahan negara-negara lain, akan menambah wawasan kita sekaligus bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi negara kita. Oleh karena itu, setelah mengetahui persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahan, maka kita dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik.

Perbedaan penerapan sistem pemerintahan antar negara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah komitmen elite politik terhadap sistem politik yang hendak diwujudkan, sistem kepartaian yang berkembang di negara yang bersangkutan, tradisi politik yang telah berkembang di negara yang bersangkutan, serta budaya politik dominan di masyarakat yang bersangkutan.

Pertama adalah sistem pemerintahan politik, hal ini perlu diidentifikasi, dalam penerapan perbandingan suatu negara sebab bentuk dan sistem pemerintah adalah faktor utama atas berjalannya suatu negara. Kedua adalah pertumbuhan ekonomi negara yang berkembang di negara yang bersangkutan, hal ini juga sangat berkaitan erat dengan sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. Ketiga adalah kesejahteraan sosial dimana hal tersebut lebih berkaitan dengan rakyat. Dari semua faktor di atas terlihat jelas jika masing-masing negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sekali pun sama tetap ada yang berbeda. Begitu pula, sistem pemerintahan Indonesia terhadap sistem pemerintahan negara lain. Maka penulis menganalisis perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan salah satu negara yaitu Selandia Baru dalam suatu makalah dengan judul, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan negara Selandia Baru", yang akan menjelaskan lebih jauh mengenai perbandingan keduanya.

METODE

Teknik pengumpulan data adalah proses penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang andal. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Internet Searching.

Internet Searching adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian.

HASIL

Negara adalah suatu daerah atau wilayah di permukaan bumi yang memiliki pemerintah yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan sebagainya. Dalam suatu negara minimal ada unsur negara, seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Berikut beberapa pengertian mengenai Negara :

- a. Menurut Roger F. Soltau, Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikannya persoalan bersama atas nama masyarakat.
- b. Menurut Georg Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.

- c. Menurut Prof. R. Djokosoetono, Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
- d. Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Negara adalah organisasi kesusilaan sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
- e. Menurut Roelof Karannenburg, Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau kehendaknya sendiri.
- f. Menurut H.J Laski, Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah, lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

Dari uraian di atas pengertian administrasi negara mengandung pengertian kolektif yang meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai suatu organisasi yang terdiri dari lembaga-lembaga beserta fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup di dalam suatu negara dan semuanya diarahkan untuk pencapaian tujuan negara. Setiap negara tidak menggunakan cara yang sama. Demikian pula yang menjadi cita-cita atau tuntutan dari warga negara, hal ini didasarkan kepada kebutuhan masing-masing negara sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan kebutuhan tersebut. Dengan sendirinya terdapat perbedaan pula dalam pengaturan administrasi masing-masing negara baik dalam mempersiapkan alat pelengkap sebagai sarana pencapaian tujuan maupun cara pencapaian tujuannya sendiri maupun cara pencapaian tujuannya sendiri. Adanya perbedaan atau ketidaksamaan itulah yang menjadikan ruang lingkup yang menonjol dari disiplin cabang ilmu pengetahuan perbandingan administrasi negara karena ruang lingkup pembahasannya tidak terlepas dari sistem administrasi negara dengan berbagai hal berkenaan pemikiran, masalah serta segala institusi yang terdapat di dalamnya.

DISKUSI

1. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karena nyatunduk dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Inilah ciri penting upaya pemurnian dan penguatan yang dilakukan terhadap sistem pemerintah presidensial berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Namun demikian, dalam praktik pada masa reformasi dewasa ini, sering timbul anggapan umum bahwa sistem presidential yang dianut dewasa ini masih beraroma parlementer. Bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa sistem pemerintah yang sekarang kita anut justru semakin memperlihatkan gejala sistem parlementer. Jika pada masa Orde Baru, pusat kekuasaan berada sepenuhnya di tangan Presiden, maka sekarang pusat kekuasaan itu dianggap telah beralih ke DPR. Sebagai akibat pendahulu perubahan dari sistem yang sebelumnya memperlihatkan gejala "executive heavy", sekarang sebaliknya timbul gejala "legislative heavy" dalam setiap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi parlemen. Sistem Pemerintahan Indonesia terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.

2. Sistem pemerintahan Selandia Baru

Selandia Baru merupakan negara berbentuk pemerintahan Monarki Konstitusional dengan sistem parlemen. Setelah kedaulatan Inggris di wilayah ini dijalankan pada tahun 1840, Undang-Undang tahun 1852 kemudian menciptakan sistem pemerintahan pertama, termasuk sistem

legislatif bikameral (dua kamar) dan dewan provinsi. Legislasi tambahan seperti eliminasi majelistinggi kemudian memodifikasi kebanyakan provinsi. Seperti halnya Kerajaan Inggris, Selandia Baru tidak memiliki Undang-Undang Dasar khusus. Legislasi konstitusional merupakan akumulasi dari undang-undang dan hukum-hukum tambahan. Selama seratus tahun pertama, kebijakan politik Selandia Baru selalu mengikuti arah kebijakan Inggris. Dalam pernyataan perang dengan Jerman ditahun 1939, Perdana Menteri Michael Savage menyatakan “*Where she goes, we go; where she stands, we stand*”.

Susunan Lembaga Pemerintahan Selandia Baru:

- a. Eksekutif
- b. Legislatif
- c. Yudikatif
- d. Partai Politik
- e. Pemerintahan Lokal
- f. Pertahanan
- g. Organisasi Internasional

3. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Di dalam ilmu ekonomi terdapat tiga sektor utama yaitu :

- a. Sektor primer.
- b. Sektor sekunder.
- c. Sektor tersier
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
 - a. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional sebagai sistem paling konvensional dengan dua elemen utama didalamnya yaitu menghargai tradisi dan minimnya jumlah limbah yang dihasilkan. Sistem ekonomi tradisional sendiri identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Cara transaksi yang digunakan dengan cara bertukar barang sebab hasil dari alam dan tenaga manusia adalah modal utama di masyarakat saat itu. Dalam sistem ekonomi tradisional Pemerintah tidak berhubungan langsung dalam aktivitas ekonomi, ia hanya berperan sebagai penjaga ketertiban. Tujuan utama sistem ekonomi ini sendiri hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya yang terpenuhi bukan mencari keuntungan.

- b. Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando memiliki sistem yang terpusat, dan terdominasi. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi mulai dari peralatan hingga ke fasilitasnya. Faktor dominasi sendiri jelas terlihat pada sumber daya berharga, karena sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikuasai oleh pemerintah dan sumber daya lainnya akan dikelola oleh rakyat.

- c. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran atau dikenal juga dengan istilah dual economy sebab mengkombinasikan sistem ekonomi pasar dan komando. Hasilnya pemerintah dan pasar kemudian bekerja sama dalam mengelola sumber daya yang ada. Pemerintah mengakui hak milik perorangan dengan catatan tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah berperan dalam memberikan batasan dan dapat melakukan intervensi, Pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan

dengan perekonomian, Persaingan kemudian terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih dimana pemerintah turut melakukan pengawasan.

Mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Pemerintah menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pihak pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian. Meski demikian sistem ini juga rawan mengalami masalah khususnya saat kekuatan pemerintah meningkat.

d. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi (Pekerja, pengusaha, modal dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat tapi pengelolaannya diatur oleh negara secara penuh). Pemerintah juga berperan penuh dalam mengatur distribusi dan hasil produksi. Di Indonesia sendiri terdapat satu bentuk ekonomi Pancasila yang berlandaskan kepada ideologi Pancasila dengan makna ekonomi demokrasi dan menganut asas kekeluargaan serta gotong royong dengan konsep dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem Pancasila tersebut, koperasi juga dijadikan salah satu ujung tombak oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan perekonomian.

e. Sistem Ekonomi Pasar

Sistem Ekonomi pasar terlihat lebih identik dengan pasar bebas. Dalam sistem ini, organisasi yang dijalankan oleh masyarakatlah yang menentukan bagaimana perekonomian akan berjalan, bagaimana pasokan dihasilkan hingga tuntutan apa saja yang diperlukan. Faktanya, tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan sistem ini secara penuh. Keuntungan terbesar dari sistem pasar ini adalah terpisahnya pasar dan pemerintah. Hal ini mengurangi dominasi pemerintah dan kemajuan serta inovasi bisa berkembang dengan lebih cepat. Dengan adanya sistem ini, maka pebisnis juga harus dapat menyikapi dengan cepat berbagai resiko dari pasar bebas seperti kemungkinan adanya inflasi dan pahami dengan cepat penyebab dari inflasi tersebut.

f. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem ekonomi yang di mana semua anggota masyarakat diberikan kebebasan oleh negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang satu ini sering juga disebut dengan istilah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi liberal bisa dibilang sebagai sistem ekonomi yang lebih mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pengusaha akan selalu berusaha untuk selalu produktif agar keuntungan tetap terjaga.

g. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi di bawah kendali setiap anggota masyarakat, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat menjadi hal yang utama. Oleh sebab itu, sistem ekonomi ini sering disebut juga dengan nama ekonomi pancasila.

Pertumbuhan ekonomi bertambah untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, naik menjadi persen pada tahun 2016 dari 4,9 persen pada 2015, meski ketidakpastian kebijakan global masih tinggi. Rupiah yang stabil, inflasi yang rendah, turunnya angka pengangguran dan naiknya upah riil mengangkat kepercayaan konsumen dan konsumsi swasta. Sebaliknya, belanja pemerintah dan pertumbuhan investasi melambat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi untuk 2016 secara keseluruhan. Fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh, diukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang kuat, defisit neraca berjalan dan tingkat pengangguran beberapa tahun terakhir yang rendah dalam, defisit fiskal yang terjaga baik, serta inflasi yang rendah. Kemiskinan dan ketimpangan juga menurun pada tahun 2016.

Defisit neraca berjalan saat ini berada di tingkat terendah dalam 5 tahun terakhir, yaitu 0.8% dari PDB pada kuartal keempat 2016, karena ekspor manufaktur menguat. Untuk tahun 2016 secara keseluruhan, defisit neraca berjalan berkurang dari 1,8% dari 2.0% pada tahun 2015. Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan naik menjadi 5,2 persen ditahun 2017, dan mencapai 5,3 persen

pada 2018. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan semakin baik dengan adanya Rupiah yang stabil, upah riil lebih tinggi dan terus menurunnya angka pengangguran. Pertumbuhan investasi swasta diproyeksikan naik seiring pulihnya harga-harga komoditas, serta dampak kemudahan moneter pada tahun 2016 dan mulai berdampak reformasi ekonomi belakangan ini. Harga komoditas yang lebih tinggi juga akan mengurangi hambatan fiskal dan mengangkat belanja pemerintah, sementara pertumbuhan global yang lebih kuat akan mendorong ekspor.

- Pertumbuhan Ekonomi Selandia Baru
Selandia Baru memiliki sistem ekonomi liberalis maupun kapitalis karena memiliki ciri-ciri:
 - a. Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
 - b. Masyarakat di beri kebebasan dalam memiliki sumber – sumber produksi.
 - c. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
 - d. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya dan masyarakat buruh.
 - e. Barang – barang yang dihasilkan bermutu tinggi.
 - f. Selandia baru tidak termasuk sistem perekonomian Etatisme maupun Sosialis karena :
 - g. Pemerintahan di Selandia Baru tidak menguasai langsung dalam kegiatan ekonominya.
 - h. Semua alat produksi tidak dikuasai oleh negara.

Berikut perkembangan ekonomi di Selandia Baru :

- a. Ekonomi Selandia Baru melebihi ekspektasi menjadi tumbuh 0,8% poin pada kuartal September karena Piala Dunia Rugby mendorong produk domestik bruto
- b. Kekuatan baru di sektor manufaktur juga mengangkat pertumbuhan, yang berarti ekonomi tumbuh 1,3% dalam 12 bulan hingga 30 September 2017
- c. Statistik Selandia Baru (SNZ) mengatakan. Hasil kuartalan menunjukkan perekonomian memantul kembali dari pertumbuhan hanya 0,1 poin dalam tiga bulan sampai Juni dan melampaui prakiraan pasar naik 0,6 poin.
- d. Penggerak besar di manufaktur adalah dari makanan, minuman, dan tembakau, yang telah meningkat terbesar sejak 2002 Manufaktur naik 2,3 poin selama kuartal tersebut, dengan makanan, minuman, dan tembakau melonjak 6,3 poin didukung kenaikan produksi daging dan susu dalam ekonomi yang mengandalkan pertanian
- e. Pertumbuhan Selandia baru di pengaruhi dengan di adakannya sistem pasar bebas, dengan adanya sistem ini perekonomian disana dapat meningkatkan karena didukung oleh faktor kekayaan alam yang dimiliki oleh selandia baru.

4. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan mereka untuk membangun hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

- i. Kesejahteraan Pendidikan Indonesia

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dalam posisinya masih dikatakan sebagai Negara berkembang sedang mencari bentuk tentang bagaimana cara dan upaya agar menjadi negara maju terutama dibidang pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satunya dengan ditetapkannya kebijakan wajib belajar 12 tahun yang diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Segala upaya dalam penerapan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa hingga kini masih dijalankan. Bahkan, Indonesia telah mengeluarkan berbagai inovasi mengenai bantuan-bantuan pendidikan guna menunjang pencapaian tujuan tersebut. Terdapat Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Siswa (BOS), hingga Program Indonesia Pintar pun juga direalisasikan.

ii. Kesejahteraan Pendidikan Selandia Baru

Kurikulum di New Zealand sifatnya adalah kurikulum umum yang memfokuskan pada pembelajaran secara individual dan dalam kelompok kecil. Karena sifatnya hanya mencakup hal-hal yang umum saja, maka sekolah diberi kesempatan untuk melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Tidak ada ujian nasional yang diselenggarakan di sekolah-sekolah di New Zealand hingga siswa berusia 15 tahun, ketika siswa belajar di secondary school. Penilaian lebih banyak dilakukan secara formatif. Selain itu, outdoor education juga menjadi salah satu titik fokus pada kurikulum yang berlaku di New Zealand. Kebanyakan sekolah di New Zealand adalah sekolah negeri, sehingga dukungan dari pemerintah dan masyarakat merupakan faktor pendukung utama penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Primary Education dimulai dari Kindergarten (TK/Taman Kanak-Kanak) sampai Year 8 (kelas 8). Usia yang ada di jenjang ini mulai dari anak usia 5 – 12 tahun. Jadi ini bisa disebut jenjang TK sampai SD. *Secondary Education* dimulai dari Year 9 – Year 10 (SMP) terus lanjut ke Year 11 – Year 13 (SMA), dan Jenjang Year 11 – Year 13 juga biasa disebut NCEA Level 1 – NCEA Level 3. NCE (National Certificate of Education Achievement) adalah kurikulum dari pemerintah Selandia Baru. Kurikulum ini telah diakui di negara lain seperti di Inggris, Australia, Amerika, dll. Jadi ini adalah jenjang SMP nyampe SMA di Selandia Baru. Ya, mereka memang sampai kelas 13 beda dengan Indonesia yang hanya sampai kelas 12. *Tertiary Education* ini jenjang setelah lulus kelas 13. Di mulai dari Certificate Education, Diploma, Bachelors Degree, Graduate Certificate/Graduate Diploma, Honours Bachelors Degree, Post Graduate Certificate/Post Graduate Diploma, Master, Doctorate.

5. Jaminan Sosial

Jaminan sosial ialah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

- Jaminan Sosial Indonesia

Berdasarkan Pasal 18 UU 40/2004 yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja ini, terdapat beberapa jenis program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meliputi:

1. Jaminan kesehatan

Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

2. Jaminan kecelakaan kerja

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

3. Jaminan hari tua

Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

4. Jaminan pensiun

Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai:

- a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
- b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;
- c. Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
- d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
- e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Jaminan kematian

Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui BPJS.

6. Jaminan kehilangan pekerjaan

Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

7. Jaminan Sosial Selandia Baru

Program jamsos yang diberikan meliputi jaminan kesehatan (JK)komprehensif seperti Jamkesmas di Indonesia. JK juga memberikan manfaatuang tunai bagi orang yang sementara tidak bisa bekerja karena sakit, cacat, ataukecelakaan. Kemudian jaminan pengangguran (*unemployment benefit*) bagi penduduk yang berusia diatas 18 tahun dan belum memiliki pekerjaan (kecuali bagi mahasiswa) yang secara otomatis berhenti bila sudah mendapat pekerjaan. Juga jaminan kecacatan (*invalid's benefit*) bagi penyandang cacat permanen akibat kecelakaan atau sakit yang kronis, dan jaminan pensiun bagi penduduk berusia diatas 65 tahun. Selain ke 4 jamsos tersebut tersebut, masih ada beberapa jaminan lainnya antara lain santunan untuk para pejuang dan veteran, bantuan untuk lansia yang tinggal sendiri, bantuan anak (*child benefit*) serta bantuan biaya hidup bagi mahasiswa. Sebagai badan pelaksana *Ministry of Social Devement, Ministry of Health, Ministry of Labour*, dan Badan Kompensasi Kecelakaan (*Accident Compensation Corporation*).

6. Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Sistem Administrasi Negara Selandia Baru

No	Kategori	Indonesia	Selandia Baru
1.	Bentuk Negara	Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi	25 wilayah, 13 dewan kota, 53 dewan distrik
2.	Bentuk Pemerintahan	Republik	Monarki Konstitusional
3.	Sistem Pemerintahan	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun	Parlementer
4.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat secara langsung (pemilu)	Ratu sebagai Kepala Negara, Gubernur jenderal
5.	Legislatif	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota	Majelis Perwakilan

		MPR	
6.	Yudikatif	MA dan badan peradilan di bawahnya dan MK	Mahkamah Distrik, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Banding, dan Mahkamah Agung,
7.	Pendidikan	Wajib belajar 12 tahun Terdapat berbagai jaminan pendidikan (BOS, BSM, Program Siswa Pintar)	Wajib belajar 20 tahun Kurikulum fleksibel Anggaran wajib belajar 20 tahun gratis
8.	Jaminan Sosial	Jaminan Kesehatan (BPJS, KIS) Jaminan Cacat Jaminan Kecelakaan Jaminan Hari Tua Jaminan Ketenagakerjaan Jaminan Kematian	Jaminan Pengangguran Jaminan Kecacatan Jaminan Kesehatan Jaminan Pensiun Segala anggaran dana ditanggung oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sistem pemerintahan Indonesia dan Selandia Baru, penulis dapat menyimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Ini memiliki sistem presidensial di Indonesia dan sistem parlementer di Selandia Baru. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden, sedangkan di Selandia Baru, ratu/raja adalah kepala negara. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah republik, di Selandia Baru monarki konstitusional. Tentunya setiap orang memiliki pro dan kontra dalam melaksanakan program dan kebijakan yang ada. Dimana Indonesia lebih ingin melakukan inovasi kebijakan di bidang perlindungan sosial namun tertahan oleh kondisi ekonomi, sedangkan Selandia Baru memiliki program yang cukup percaya diri dengan anggaran yang sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- PKN-STAN. 2018. *Seri Ekonomi makro – teori Pertumbuhan ekonomi*. Tersedia: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-seri-ekonomi-makro-teori-pertumbuhan-ekonomi/detail/>. [Mei 2023].
- Learninghub. *Jaminan Sosial Apa Saja Yang Diberikan Oleh Indonesia Kepada Warganya*. Tersedia: <https://learninghub.id/jaminan-sosial-apa-saja-yang-diberikan-oleh-indonesia-kepada-warganya/>. [Mei 2023].
- Ermawati, Eli. 2017. *Perbedaan Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia Dengan di Negara Selandia Baru*. Tersedia: <https://elitugasku.blogspot.com/2017/03/bab-i-pendahuluan-1.html>. [Mei 2023].
- Kurniasih, Wida. 2021. *Apa Itu Sistem Pemerintahan? Berikut Penjelasannya*. Tersedia: <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-sistem-pemerintahan/>. [Mei 2023].
- Ahmad. 2021. *7 Sistem Ekonomi Beserta Kelebihan dan Kekurangannya*. Tersedia: <https://www.gramedia.com/literasi/macam-sistem-ekonomi/>. [Mei 2023].
- Indonesia Investments. *Ikhtisar Struktur Politik Indonesia*. Tersedia: <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385>. [Mei 2023].
- Kompas. 2021. *Produksi Sektor Primer dan Sekunder*. Tersedia:

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/11/130225969/produksi-sektor-primer-sekunder-dan-tercier?page=all>. [Mei 2023].

Adminkeperintahan. 2020. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Tersedia:

<https://pemerintahan.uma.ac.id/2020/10/sistem-pemerintahan-indonesia/>. [Mei 2023].